

Penanggung Jawab:

José Luís de Oliveira

Redaksi: A. Castro, Nuno Hanjan, A. Neves, N. Katjasungkana, Sebastião da Silva, Octavia do Carmo, Rui Viana, Koprál, Edio Saldanha, Nina Marques, Danino da Cunha, Julino Ximenes, TI, Rogério Soares, José C. Marçal. **Distribusi:** Martinho Viana

Cidadaun

Hamutuk Hari'i Nasaun Demokratiko

Penerbit:

Yayasan HAK

Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol, Dili

Tel. + 670 390 313323

Fax. + 670 390 313324

e-mail: direito@yayasanhak.minihub.org

Dengan dukungan:



No. 01, Minggu I, Agustus 2001

• ISI NOMOR INI •



Opini Aniceto Guterres Lopes Hal. 2



Apa Itu Pemilu? Hal. 4



Kandidat Hal. 7

BERITA PEMANTAUAN

Pemilu Perlu Dipantau Rakyat? Hal. 3

Kampanye Masih Lesu Hal. 3

TATOLI

Apa Itu Pemilu Hal. 4

Sebelum Pemilu Hal. 4

KANDIDAT

Partido Democrata Cristão Hal. 5

Domingos Alves Hal. 5

Parentil Hal. 6

Olandina Caeiro Hal. 6

Partido Social Democrata Hal. 7

Partido KOTA Hal. 7

ADVOKASI

Mengapa Pemilu? Hal. 8



F.X. SUMARYONO

Kampanye Pemilu Dimulai

...

Kampanye Pemilihan Umum Majelis Konstituante telah dimulai hari Minggu, 15 Juli 2001. Fretilin membuka hari pertama kampanye itu dengan rapat umum di Lapangan Demokrasi (dulu Lapangan Pramuka), Dili. Acara yang sekaligus penutupan Kongres Luar Biasa itu berlangsung dari pukul 16.00 hingga 19.00. Sekitar 4.000 orang menghadiri acara ini. Banyak di antara mereka melakukan pawai keliling kota sebelum memasuki lapangan. Pada acara ini Fretilin memperkenalkan 75 kandidat untuk pemilihan umum (pemilu). Beberapa hari kemudian Fretilin menggetarkan Liquiça dengan kampanye yang dihadiri sekitar 3.000 orang yang berasal dari Sub-Distrik Bazar-Tete, Liquiça dan Maubara.

Hanya Fretilin yang berkampanye pada hari pertama itu. PST (Partido Socialista de Timor) memulai kampanyenya pada 16 Juli, dengan pawai jalan kaki menampilkan juru kampanye andalannya, Sekretaris Jenderal Avelino Coelho di Liquiça. Sementara Partido Social Democrata (PSD) memulai kampanyenya di Lospalos, 19 Juli, dengan dialog publik menampilkan Riak Leman dan Mário Viegas Carrascalão. Sekitar 1.000 orang menghadiri kampanye ini. Selanjutnya PSD mengadakan kampanye di Dili, 22 Juli, dengan pawai bermobil yang dilanjutkan dengan pidato di Ginasio Dili (dulu Gedung Matahari Terbit).

Partai paling tua, UDT (União Democrática Timorense) belum melakukan kampanye dengan mengumpulkan massa. Hari Jumat, 20 Juli, sejumlah juru kampanye mereka yang hendak pergi berkampanye di Same malah dicegat dan dilempari sekelompok pemuda di kawasan Lahane.

Partai-partai lain dan kandidat independen sampai saat ini belum mengadakan kampanye dengan cara rapat umum mengumpulkan massa atau pawai. PTT (Partido Trabalhista Timorense) membagikan dan menempelkan selebaran di beberapa sudut kota Dili. Partai-partai lain, termasuk Fretilin, belum juga menyebarkan selebaran atau poster kampanye. Sebagian partai melakukan kampa-

nye dengan cara *door to door* (dari rumah ke rumah) a la masa *clandestina* dulu.

Pihak UNTAET, sesuai mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB bertanggungjawab atas pemilihan umum ini, menyediakan fasilitas radio dan televisi untuk kampanye partai-partai. Pada siaran hari Senin, 16 Juli, TVTL menampilkan 14 kandidat dari partai politik dan empat kandidat independen. Kandidat yang, karena alasan teknis, tidak tampil adalah PSD, Fretilin dan kandidat independen Olandina Caeiro.

Asosiasaun Jurnalista Timor Lorosae (AJTL) pada 17 Juli mengorganisir acara dialog partai politik dengan kalangan jurnalis. Acara yang disiarkan langsung oleh TVTL dan Radio UNTAET ini, dimoderatori oleh mantan Wakil Ketua CNRT Dr. José Ramos-Horta. Acara yang dihadiri oleh Uskup Dili Dom Carlos Belo, mantan ketua CNRT Xanana Gusmão, dan pejabat-pejabat UNTAET ini sangat menarik karena para pengurus partai-partai politik seperti diuji pandangannya mengenai banyak hal penting bagi masa depan Timor Lorosae. Sayangnya waktunya terlalu panjang, lebih dari enam jam, sehingga banyak orang yang tidak bisa mengikuti penuh. Akan lebih baik kalau acara ini dipecah menjadi beberapa kali pertemuan.

Kalau dilihat dari bersemangatnya orang membentuk partai-partai, masa kampanye ini cukup mengherankan sepiunya. Menurut pengamatan Komite untuk Pemilu yang Bebas dan Adil, di Dili maupun distrik-distrik lain, suasana tidak berubah menjadi gegap-gempita dengan arak-arakan dan slogan-slogan politik partai/kandidat independen. Suasananya biasa-biasa saja, seolah-olah ini bukan masa perlombaan memperebutkan dukungan rakyat. Jika keadaan ini tetap berlangsung, para pemilih akan dirugikan, karena mereka tidak mendapat informasi yang cukup tentang program partai-partai. Padahal informasi ini mereka perlukan untuk menetapkan pilihan. ●

José Luís de Oliveira



F.X. SUMARYONO

Kampanye PSD di Ginasio, Dili.

Pemilu Pertama

Kampanye untuk Pemilihan Umum Majelis Konstituante telah dimulai. Di Dili, kampanye dimulai oleh Fretilin di lapangan Demokrasi. Di distrik lain, belum tampak kesibukan para kandidat melakukan kampanye. Kekhawatiran beberapa pihak bahwa banyaknya peserta pemilu akan menimbulkan persaingan ketat, ternyata belum terbukti. Jatah kampanye melalui televisi pada minggu pertama baru dimanfaatkan oleh sebagian dari 16 partai politik dan lima orang kandidat independen nasional.

Semangat berkobak-kobar untuk mendirikan partai politik tampaknya tidak diimbangi dengan semangat rakyat untuk mengikuti kampanye. Ada apa ini?

Terlepas dari kekurangan-kekurangan teknis yang seharusnya disediakan dan diatur oleh Komisi Pemilihan Independen untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik, seperti jadwal kampanye, peraturan kampanye dan lain sebagainya, ada sebuah persoalan mendasar yang membuat rakyat kurang bersemangat dengan proses pemilu ini. Persoalan itu adalah terbatasnya pemahaman orang tentang maksud dan tujuan maupun proses pemilu. Di kalangan rakyat, masih dijumpai anggapan bahwa pemilu ini untuk membentuk pemerintahan dan memilih presiden. Bahkan para kandidat egitu juga dengan beberapa kandidat, dalam acara kampanye di TV beberapa waktu lalu, masih sedikit yang isi kampanyenya menyangkut substansi konsitusi.

Di satu sisi, mungkin kita bisa mengerti bahwa pemilu yang akan diadakan adalah sebuah pemilu yang jarang terjadi di dunia. Selama ini, pemilu yang dilakukan selalu untuk memilih anggota parlemen atau presiden. Dan begitu juga dengan rakyat Timor Lorosae, selama ini hanya punya pengalaman mengikuti pemilu pada masa pendudukan Indonesia, adalah untuk memilih wakil rakyat untuk membentuk pemerintahan.

Di sisi lain, Preserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama ini belum memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilu untuk sebuah proses pembentukan negara baru. Di Kamboja, PBB menyelenggarakan pemilu untuk membentuk pemerintahan, dimana negara Kamboja telah ada. Nampak bahwa hanya dengan mengandalkan sumber daya – terutama dana yang begitu banyak, UNTAET berambisi mempercepat proses pemilu, tetapi persiapannya tidak memadai. Sampai saat ini, baru peraturan tentang pelanggaran pemilu yang dikeluarkan oleh UNTAET, itupun isi dari peraturannya masih belum memadai untuk mengantisipasi persoalan yang bila timbul. Sedangkan peraturan atau tata tertib (*code of conduct*) kampanye hingga saat ini belum dikeluarkan.

Program pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan untuk mempersiapkan rakyat, cenderung hanya “mengajarkan” demokrasi yang artifisial. Hal penting dalam konteks politik transisi seperti pemahaman tentang konsep bernegara, bentuk pemerintahan, sistem ekonomi yang pada dasarnya merupakan hal pokok dalam konstitusi, kurang disentuh.

Sedang penyebaran informasi masih lebih banyak terkonsentrasi di Dili. Di distrik-distrik, sangat banyak orang yang belum punya akses ke informasi. Akibatnya rakyat masih khawatir dengan pengalaman masa lalu. Mereka berpartisipasi hanya karena merasa punya kewajiban dalam pembentukan negara merdeka ini, tanpa didukung pengetahuan yang memadai. Keadaan ini mudah dimanfaatkan pihak tertentu, misalnya mengintimidasi orang untuk tidak mendaftar.

Sebagai lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia, Yayasan HAK menerbitkan tabloid mingguan *Cidadaun* untuk menyebarkan informasi kepada rakyat, sehingga hak rakyat atas informasi dapat dipenuhi, dan pada gilirannya rakyat dapat menggunakan hak politiknya secara sadar dan bertanggungjawab. Nama *Cidadaun* berasal dari kata dalam bahasa Portugis, *cidadão* yang berarti warganegara. Dengan membaca terbitan ini, diharapkan setiap orang Timor Lorosae dapat menjadi warga negara yang baik. Cidadaun

• Pffu iiii! •

“Fretilin itu komunis! Saya tahu karena 24 tahun bersama mereka di hutan,” kata Riak Leman (PSD) dalam kampanye di Lospalos.

Kok sama dengan kata-kata boss BAKIN Jenderal Ali Moertopo menjelang invasi 7 Desember 1975.

Pidato Presiden Fretilin Lu-Olo dalam kampanye di Lapangan Demokrasi, Dili, 14 Juli, panjang lebar menguraikan perjuangan di Matebian.

Apa di tempat lain rakyat tidak berjuang, Camarada?



NUG KATASUNGKANA

Pemilu yang Jujur dan Adil: Bagaimana Persiapannya?

• Aniceto Guterres Lopes •

Pemilu yang menurut rencana dilaksanakan pada 30 Agustus mendatang tampaknya tak dapat ditunda lagi. Pada masa kampanye sekarang, dari sana-sini terdengar suara-suara tidak puas. Misalnya, mengenai belum adanya ketentuan perilaku (*code of conduct*) kampanye dan jadwal kampanye untuk partai-partai politik/kandidat independen. Dalam hal ini patut dipertanyakan apakah pemilu telah dipersiapkan dengan baik? Kalau tidak, apa dampaknya terhadap prinsip jujur dan adil dalam pemilu?

Pemilu yang sekarang ini merupakan sarana yang sangat penting bagi transisi politik yang demokratis menuju kemerdekaan penuh Timor Lorosae. Melalui sarana inilah rakyat dapat menggunakan hak politiknya untuk memberikan kontribusi penting bagi tersusunnya sebuah Majelis Konstituante, yang bertugas menyusun dan mengesahkan konstitusi yang benar-benar menjadi keinginan seluruh rakyat Timor Lorosae. Oleh karena itu, pemilu yang berkualitas melalui persiapan yang matang dan keikutsertaan semua orang Timor Lorosae yang punya hak pilih menjadi penting pula.

Sebagaimana layaknya sebuah pemilu, pada prinsipnya ada dua aspek penting yang perlu mendapat perhatian pada saat persiapan. Pertama, aspek *electoral law* (hukum tentang pemilu), yaitu meliputi sistem pemilihan dan perangkat peraturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan serta bagaimana distribusi hasil pemilu terjadi. Kedua, *electoral process* (proses pemilihan umum), yaitu mekanisme yang dijalankan di dalam setiap tahap pemilu, seperti pendaftaran dan penetapan daftar pemilih tetap, pencalonan dan penetapan calon setiap kontestan (partai politik dan kandidat independen), kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara sampai pada penentuan dan pengesahan hasil pemilu.

Ada beberapa kelemahan dalam persiapan pemilu pertama kita, yang dapat berpengaruh pada sukses atau adil dan tidaknya pemilu itu sendiri. Tulisan ini membahas kelemahan di bidang *electoral law*.

Dari segi *electoral law*, UNTAET telah mengeluarkan Peraturan UNTAET No. 2001/2 tentang Pemilihan Umum Majelis Konstituante Timor Lorosae Yang Merdeka dan Demokratis sebagai “peraturan pokok mengenai pemilu” untuk memilih Majelis Konstituante. Peraturan ini mengatur tentang sistem pemilu, syarat untuk memilih dan dipilih, Komisi Independen Pemilu (KPI), jumlah kursi, mandat, dan masa kerja Majelis Konstituante, peserta pemilu dan lain-lain, tetapi tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur tentang bagaimana pemungutan

suara dilakukan, bagaimana mekanisme dan di mana penghitungan suara dilakukan, mekanisme pengawasan dan akses partai politik/kandidat independen peserta pemilu dalam proses penghitungan suara, bagaimana pembagian kursi dilakukan berdasarkan suara yang diperoleh, siapa yang berwenang mengesahkan hasil pemilu dan sebagainya.

Pada saat pembahasan rancangan regulasi ini di Dewan Nasional, UNTAET berjanji akan menetapkan hal-hal tersebut dalam peraturan pelaksana, yang akan dikeluarkan oleh Administrator Transisi bersama-sama dengan KPI. Tetapi, sampai dimulainya kampanye belum ada satu pun peraturan pelaksana yang dikeluarkan.

Ini salah satu bukti bahwa pemilu dipersiapkan dengan kurang baik. Seharusnya semua ketentuan itu sudah diselesaikan sebelum proses pemilu dimulai, kecuali hal-hal teknis penyelenggaraan yang diserahkan kepada KPI.

Persoalannya bukan saja apakah ada atau tidak peraturan yang mengatur hal-hal tersebut, tetapi adalah prinsip bahwa suatu aturan

F.X. SUMARYONO



Kantor pusat Komisi Pemilih Independen di Dili

main untuk memastikan bagaimana pemilu dijalankan dan distribusi hasil pemilu itu dilakukan secara jujur dan adil harus dibuat secara transparan (tidak dibuat sepihak oleh KPI maupun UNTAET) jauh sebelum proses pemilu

dimulai. Sebab, ketidakadilan sebuah pemilu tidak hanya bisa terjadi selama berlangsungnya proses pemilu, tetapi juga bisa terjadi pada sistem dan perangkat hukum yang mengatur tentang pemilu.

Regulasi mengenai pelanggaran pemilu baru dikeluarkan dua hari sebelum kampanye dimulai. Seharusnya ketentuan pelanggaran pemilu menjadi bagian dari Peraturan No. 2001/2 atau paling tidak menjadi paket dengannya. Ketika regulasi itu dikeluarkan, beberapa ketentuan di dalamnya telah terlebih dahulu dilanggar. Pengaduan masyarakat maupun pemberitaan media menyebutkan terjadinya “politik uang” dan ancaman yang dilakukan oleh partai atau kelompok politik tertentu.

Karena dalam hukum berlaku prinsip bahwa sebuah peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, maka mereka yang sudah melakukan pelanggaran tidak bisa dikenai sanksi menurut peraturan tersebut, meskipun telah timbul akibat dimana calon pemilih atau masyarakat telah terpengaruh dalam menentukan pilihannya. Tetapi kalau pelanggaran yang dilakukan selama proses pemilu tidak dikenai sanksi hukum karena peraturannya terlambat dikeluarkan, maka pemilu telah berlangsung secara tidak adil. •

Aniceto Guterres Lopes adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan HAK, mantan anggota Dewan Nasional Timor Lorosae.

Pemilu Perlu Dipantau Rakyat?

Berikut hasil-hasil pemantauan yang dilakukan oleh para pemantau Komite untuk Pemilu yang Bebas dan Adil.

• • •

Menghadapi pemilu Majelis Konstituante, Yayasan HAK membentuk Komite untuk Pemilu yang Bebas dan Adil. Komite ini beranggotakan seluruh staf dan relawan dan perorangan dan organisasi yang selama ini menjadi mitra kerja Yayasan HAK, baik dalam kegiatan investigasi dan pendidikan hak asasi manusia, maupun pemberdayaan masyarakat.

Pemantauan pemilu ini dilakukan sebagai suatu bentuk partisipasi warga-negara pada pembentukan negara merdeka Timor Lorosae. Partisipasi ini sama pentingnya dengan partisipasi politik berupa menjadi anggota partai.

Tujuan pemantauan pemilu ada dua. Pertama, untuk membuat seluruh tahap pelaksanaan pemilu berlangsung bebas dan adil. Bebas, dalam arti pemilih bisa memberikan pilihannya sesuai dengan keinginannya, tanpa takut akan menghadapi hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Untuk itu, para pemilih harus memperoleh informasi tentang proses pe-

milu, tata cara memberikan suara dan informasi mengenai pilihan-pilihan yang ditawarkan. Di sisi lain, pemungutan suara harus memberikan suaranya secara rahasia. Pemilihan umum juga harus berlangsung secara adil dalam pengertian



Partido Socialista de Timor (PST) berkampanye di Manatuto.

bahwa prosesnya harus tidak memihak pada salah satu partai/kandidat independen dan panitia pelaksanaannya bekerja secara independen dan netral.

Untuk membuat pelaksanaan pemilihan umum benar-benar bebas dan adil itulah perlu dilakukan pemantauan oleh pihak independen.

Tujuan kedua, memperbaiki keseluruhan sistem pemilihan umum di masa mendatang. Dengan pemantauan maka akan ditemukan kelemahan-kelemahan suatu pemilu. Baik pada peraturan-peraturan, pelaksanaannya, panitia penyelenggaranya, maupun pada partai-partai politiknya. Dari kelemahan dan kekurangan itu, bisa dirumuskan usulan-usulan untuk perbaikan pemilu menda-

tang. Ini tidak lain adalah agar pemilu benar-benar bisa memungkinkan warga-negara menjalankan hak politiknya, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Bagi Timor Lorosae, pemantauan ini penting sekali. Pemilu yang bebas dan adil adalah pengalaman yang sama sekali baru. Memang tahun 1999 rakyat Timor Lorosae mengalami Konsultasi Rakyat, yang diselenggarakan dengan standar internasional oleh PBB. Tetapi suasana menjelang dan setelah pemilu sangat tidak menunjang kebebasan, karena merajalelanya bandit-bandit bersenjata anti-kemerdekaan. Selain itu, kehidupan berpartai politik dalam suasana bebas juga sesuatu yang baru sehingga banyak terjadi kekurangan. Pemantauan pemilu sekarang sangat diperlukan, karena meletakkan dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara yang demokratis.

Komite untuk Pemilu yang Bebas dan Adil telah melatih lebih dari 80 orang pemantau dari rencana 125 orang dari 12 distrik di luar Oe-cussi.

Dalam menjalankan pemantauan, Komite untuk Pemilu yang Bebas dan Adil akan bekerjasama dengan komite serupa, baik dari Timor Lorosae maupun dari luar negeri. Sejauh ini sudah ada enam komite pemantau Timor Lorosae dan tiga komite pemantau dari luar negeri, yaitu InterBand (Jepang), Asian Network for Free Election (ANFREL, jaringan pemantau Asia), dan Carter Center (Amerika Serikat). ●

Kampanye Pemilu Masih Lesu

Kegiatan masyarakat sehari-hari tidak ada yang berubah. Seolah-olah bukan sedang menghadapi masa kampanye. Berikut adalah laporan hasil pemantauan Komite untuk Pemilu yang Bebas dan Adil.

• • •

Dari pengamatan para pemantau di distrik-distrik, dilaporkan bahwa secara umum pelaksanaan kampanye kurang begitu menarik perhatian masyarakat. Di sebagian besar distrik, aktivitas anggota masyarakat seperti biasa saja, seperti tidak begitu peduli dengan proses pemilu yang sedang berjalan. "Ya, kami tahu sekarang partai politik sedang kampanye. Tetapi, saya kurang tertarik untuk ikut kampanye, karena mereka banyak janji-janji. Sampai sekarang, bantuan peralatan untuk membangun rumah kami yang dibakar dua tahun lalu saja belum dipenuhi," ujar Tio Manuel, seorang petani sayur di Maubisse kepada *Cidadaun* beberapa hari lalu.

Rapat Umum

Baru sedikit partai politik yang mengadakan kampanye dengan rapat umum maupun pawai, yaitu Fretilin, PST dan Partido Social Democrata (PSD). Rapat umum dan pawai baru diadakan di Dili, Liquica, Ermera, Manatuto, dan Aileu.

Dalam kampanye seperti ini dijumpai adanya mobilisasi anak-anak di bawah

umur.

Kampanye dari rumah ke rumah

Di beberapa distrik dilaporkan aktivitas kampanye dilakukan dari rumah ke rumah. Salah seorang pimpinan partai yang dijumpai di Baucau mengatakan bahwa, "Kita semua pernah berklandes-tin. Dan cara ini cukup efektif ketika kita melawan pendudukan Indonesia." Kampanye ini dilakukan karena partai-partai yang bersangkutan belum dikenal oleh masyarakat. Selain itu, karena terbatasnya sumber daya partai-partai baru. Fasilitas yang dijanjikan UNTAET sampai dengan saat ini belum terealisasi.

Selebaran dan poster

Hanya beberapa partai dan kandidat independen yang membagikan dan menempelkan selebaran dan poster. Partido Trabalhista Timorese (PTT) menempelkan selebaran di beberapa tempat. PSD dan UDT membagikan stiker.

UNDP yang pernah menjanjikan untuk membantu mencetak poster dan brosur untuk peserta pemilu, belum juga terwujud. Materi kampanye yang di-

cetak di Australia itu kabarnya baru akan selesai awal Agustus.

Kampanye melalui radio dan televisi

Radio UNTAET dan Televisi Timor Lorosae (TVTL) telah menyediakan siaran untuk kampanye. Setiap siang dan malam hari TVTL menyiarkan pidato para juru kampanye yang direkam sebelumnya. Semua partai telah memanfaatkan fasilitas ini.

Pada 17 Juli, di gedung OCPI (Office of Communication and Public Information, Kantor Komunikasi dan Informasi Umum) UNTAET, diselenggarakan acara dialog antara partai politik dengan jurnalis yang menampilkan Dr. Ramos Horta sebagai moderator. Acara ini dilanjutkan dengan program Soru Mutu setiap hari pukul 17.00, yang menampilkan secara bergiliran partai-partai politik dan kandidat independen. Radio UNTAET dan TVTL pun menyiarkannya.

Partai politik yang berbicara tentang konstitusi juga tidak banyak. Umumnya mereka berbicara tentang program pemerintahan. Dibandingkan partai politik, umumnya kandidat independen terlihat lebih siap berbicara tentang konstitusi. Ada pula yang menggunakan siaran televisi untuk berbantahan tentang suatu hal. Presiden Partido Povo Timor (PPT) dalam salah satu kampanyenya mengatakan, bahwa rakyat Timor Lorosae punya uang banyak di Bank Dunia.

Tidak lama kemudian Bank Dunia di Timor Lorosae membantah dengan menjelaskan bahwa Bank Dunia bukan bank yang sahamnya dimiliki

oleh perorangan atau organisasi non-pemerintah, juga tidak menyimpan uang perorangan. Karena itu tidak benar kalau rakyat Timor punya uang di Bank Dunia. Pihak PPT dalam acara kampanye berikutnya membantah Bank Dunia dengan mengatakan bahwa uang Portugal yang disetor ke Bank Dunia sebenarnya adalah uang rakyat Timor Lorosae.

Peraturan

Peraturan-peraturan pemilu masih belum tersebar di masyarakat. Banyak yang masih mempertanyakan peraturan pemilu yang bisa menjamin pelaksanaan pemilu dengan baik. Pacto Unidade Nasional yang ditandatangani 14 partai pada 8 Juli lalu, masih menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat karena ada partai (PNT dan Parentil) yang tidak menandatangani.

Ketentuan perilaku (*code of conduct*) partai-partai politik/kandidat independen masih juga belum ditandatangani. Rancangannya telah beredar di kalangan tertentu. Tetapi masyarakat umumnya belum mengetahuinya.

Daftar Pemilih

Pengumuman daftar pemilih telah berlalu. Calon pemilih hanya diberi kesempatan mencari tempat pemungutan suara pada 16-27 Juli. Dijumpai masalah yang bisa mempengaruhi baik tidaknya penyelenggaraan pemilu, yaitu: (1) banyak calon pemilih yang belum sempat memeriksa nama mereka; (2) banyak calon pemilih yang tempat pemungutan suaranya jauh dari tempat tinggalnya, yaitu di luar sub-distrik. ●

Apa itu Pemilu Majelis Konstituante?

Pemilu yang sekarang ini untuk memilih Majelis Konstituante, suatu badan legislatif yang bertugas menyusun dan mengesahkan konstitusi negara merdeka Timor Lorosae.

• • •

Masih banyak yang mengira pemilu yang menurut rencana dilaksanakan 30 Agustus 2001 ini adalah untuk memilih presiden. Anggapan ini juga didukung oleh kampanye partai-partai politik yang kebanyakan lebih berbicara tentang program yang akan dilakukannya kalau jika memegang pemerintahan Timor Lorosae. Misalnya beberapa juru kampanye partai politik berbicara tentang departemen-departemen yang akan dibentuk.

Sesungguhnya, menurut Regulasi UNTAET No. 2/2001 tentang Pemilu Majelis Konstituante, pemilu kali ini adalah untuk memilih Majelis Konstituante, yakni suatu badan legislatif dengan wewenang khusus menyusun dan mengesahkan konstitusi (undang-undang dasar) negara merdeka Timor Lorosae. Majelis ini beranggotakan 88 wakil, yang terdiri dari 75 orang wakil nasional dan 13 orang wakil distrik (satu distrik diwakili satu orang wakil).

Wakil nasional dipilih oleh pemilih

seluruh Timor Lorosae. Sedang wakil distrik, dipilih oleh pemilih dari masing-masing distrik.

Yang bisa menjadi kandidat untuk wakil nasional adalah partai politik dan kandidat independen (orang tidak berpartai) yang mendaftar pada Komisi Pemilihan Independen (KPI). Demikian pula kandidat wakil distrik, bisa dari partai politik bisa kandidat independen.

Penanggungjawab pelaksanaan pemilu ini adalah KPI, yang terdiri dari lima orang komisaris yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Para komisaris itu adalah (1) Jacinta Correia da Costa (Hakim Pengadilan Tinggi Dili); (2) Armindo Maia (Rektor UNTIL); (3) Bong-Scuk Sohn (Anggota Komisi Pemilu Nasional Korea Selatan, Komisaris Pemilu UNAMET 1999); (4) Michael Maley (Direktur Riset dan Pelayanan Internasional Komisi Pemilu Australia); (5) Charles Rose (mantan Sekretaris Komisi Pemilu India, Pejabat Pemilu PBB di Kamboja dan Pengamat

Pemilu di Afrika Selatan). Mereka disertai banyak petugas pemilihan yang bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemungutan suara.

Kantor pusat KPI berada di Caicoli, Dili. KPI juga telah membentuk kantor di distrik-distrik. Menurut informasi mereka juga akan mendirikan kantor di tingkat sub-distrik.

Untuk menjadi pemilih dalam pemilu ini orang harus mendaftar dan memberikan suara di Timor Lorosae. Jadi orang Timor Lorosae yang di luar negeri (termasuk di tempat pengungsian Timor Barat) harus kembali ke Timor Lorosae jika tak mau kehilangan haknya mengikuti pemilu.

Pendaftaran untuk menjadi pemilih telah dilaksanakan melalui Pencatatan Sipil (Registu Civil). Registu Civil sendiri (yang kira-kira sama dengan sensus pada zaman Indonesia) terus berlangsung, tetapi pendaftaran untuk pemilu telah berakhir pada 22 Juni lalu.

Setelah calon pemilih mendaftarkan diri melalui Registu Civil, KPI akan mengumumkan nama-nama mereka yang punya hak pilih. Pengumuman dipasang pada tempat pendaftaran dan kantor KPI nasional maupun distrik mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 27 Juli. Calon pemilih harus memeriksa daftar ini. Jika calon pemilih yang telah mendaftar namanya tidak tercantum dalam pengumuman, ia harus mengajukan masalahnya dengan membawa bukti pendaftaran kepada petugas KPI, yang se-

lanjutnya memberikan lembaran isian. KPI selanjutnya akan memproses supaya calon pemilih yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilih.

Selain daftar nama pemilih, KPI juga mengeluarkan pengumuman tentang tempat pemungutan suara. Calon pemilih juga harus memeriksa pengumuman ini supaya tidak salah tempat pada hari pemungutan suara. Seorang calon pemilih yang tinggal di Dili dan namanya tercantum sebagai pemilih untuk tempat pemungutan suara di Farol tidak bisa memberikan suaranya di Fatuhada.

Pendaftaran untuk menjadi kandidat juga telah berakhir. Partai politik yang terdaftar memenuhi syarat berjumlah 16. Sedang kandidat independen untuk wakil nasional berjumlah lima orang. Setiap partai politik berhak untuk mengajukan 75 nama calon dari partainya untuk kandidat nasional. KPI telah mengadakan undian untuk menentukan nomor urut bagi mereka.

Periode kampanye berlangsung dari tanggal 15 Juli sampai 28 Agustus. Pada masa kampanye, para pemilih hendaknya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang partai-partai politik dan para kandidat independen baik untuk wakil nasional maupun distrik. Tanggal 29 Agustus adalah hari tanpa kampanye. Setelah itu, pada 30 Agustus, para pemilih bisa mendatangi tempat pemungutan suara sesuai dengan yang telah diumumkan dan memberikan pilihannya sesuai hati nurani masing-masing. •

Nug Katjasungkana

• TATOLI •

“Sebelum Pemilu Hukum Harus Dibentuk”

Berikut ini adalah harapan-harapan tentang pemilu yang akan datang. Ditulis kembali oleh **Nina Marques** dari laporan diskusi terfokus yang diselenggarakan The National Democratic Institute (NDI) bekerjasama dengan Kelompok Kerja Pendidikan Pemilu (KKPP) Forum NGO.

• • •

Ibu (22 tahun), “Kita harus meneruskan pengalaman yang baik dan meninggalkan pengalaman yang buruk. Para pemimpin partai jangan memaksa masyarakat untuk memilih ini atau itu. Sebelum kita memasuki pemilu, hukum harus dibentuk dulu supaya ada ketentuan yang mengatur. Peraturan itu diperlukan mengingat pada saat kampanye partai politik akan mencari massa sebanyak-banyaknya. Hukum tentang pemilu juga akan mencegah timbulnya konflik.”

Pelajar laki-laki (20 tahun), “Pemilu nanti bukan hanya memilih wakil rakyat, tetapi lebih menunjukkan identitas sebagai bangsa untuk menjalankan pemerintahan, membawa masyarakat untuk lebih maju. Kita berharap pemilu berlangsung aman karena pemilu yang pertama ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan kami kepada para pemimpin partai politik untuk membuat aturan yang baik, agar kita bisa hidup tenteram di negara ini. Jangan ada lagi kekerasan seperti pada zaman Portugal dan Indonesia.”

Seorang Pengurus CNRT (26 tahun). “Pemilu akan berjalan jujur dan adil jika kita tidak menggunakan sistem pemilu Indonesia. Jika berkampanye jangan mengobral janji-janji atau menggunakan politik uang dan supaya pemilu berjalan lancar harus ada aturannya. Kita harus memberikan kebebasan kepada rakyat supaya pemilu berjalan jujur. Pada Referendum dua tahun lalu dapat berlangsung secara bebas karena UNAMET menjamin keamanan bagi pemilih. Partai politik juga tidak boleh menekan masyarakat. Perwakilan yang ada harus terdiri dari berbagai partai.”

Tokoh pendidikan (30 tahun). “Supaya pemilu pertama berjalan kredibel perlu ada pemantau dari luar Timor Lorosae yang mendukung kegiatan pemantau lokal. Kita harus melaksanakan pemilu dengan sistem yang baik supaya demokrasi dapat berjalan di Timor. UNTAET, departemen yang terkait, *aldea*, *suco* harus memberikan penjelasan kepada rakyat tentang apa itu pemilu, partai dan peserta pemilu dan hasilnya. Selain itu harus ada aturan agar sebelum pe-



Pendaftaran mengikuti pemilihan umum di Kantor Civpol Comoro, Dili.

• • •

milu setiap partai diberi kesempatan untuk menjelaskan siapa calon mereka, riwayat hidupnya, apa ideologinya supaya masyarakat tahu. Mereka harus jadi simbol pemersatu, bukan jadi simbol *divide et impera*, dan menjadi figur yang ideal bagi rakyat.”

Sementara itu, seorang petani kopi (36 tahun) memberikan komentar, “Pemilu dengan banyak partai itu lebih baik, karena di sini adalah negara yang demokrasi, supaya bisa saling mengoreksi. Kalau hanya ada satu partai itu berarti tidak ada demokrasi. Partai-partai itu harus turun untuk memberikan pengajaran kepada rakyat bagaimana program mereka supaya rakyat tahu agar tidak bingung ketika pemilihan nanti. Misalnya, mengapa FRETILIN dan

RDITL bisa saling pukul padahal RDITL lahir dari FRETILIN dan sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Banyaknya partai akan membuat rakyat bertanya-tanya, apakah mereka akan mengadu domba rakyat setelah itu mereka pergi?”

Seorang nelayan (38 tahun) mengatakan, “Suatu negara demokrasi harus menyelenggarakan pemilihan umum. Rakyat juga punya tanggungjawab. Jadi, rakyat bukan sebagai individu yang mengangkat dirinya sebagai presiden tanpa melalui pemilu. Itu bukan demokrasi, karena demokrasi harus ada pemilu. Rakyat punya hak untuk memilih para pemimpin yang duduk di parlemen untuk bicara mengenai penderitaan rakyat.” •

Partido Democrata Cristão (PDC)

Didirikan oleh orang-orang Katolik dan Protestan, PDC bertujuan menjawab terjadinya kehancuran fisik dan spiritual di Timor Lorosae.

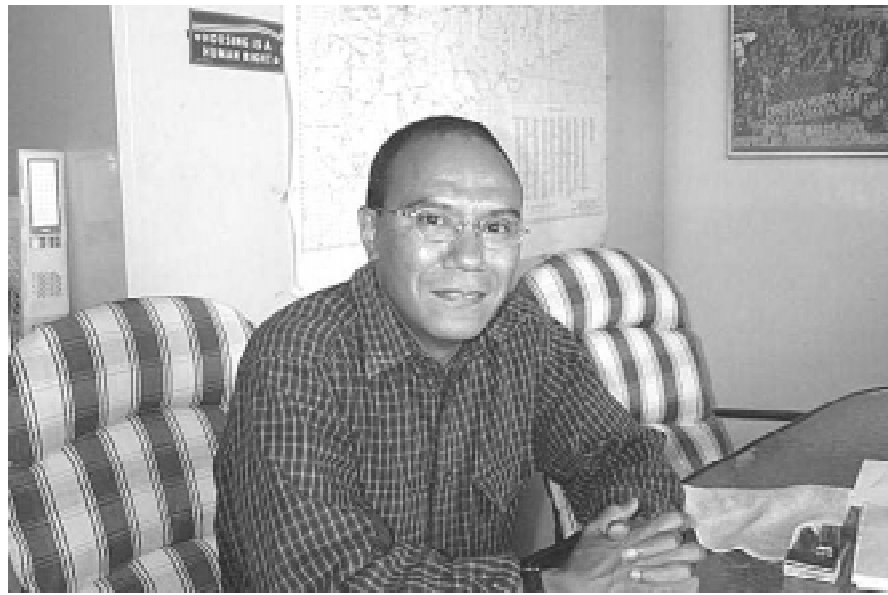
• • •

Partido Democrata Cristão (Partai Demokrat Kristen) didirikan oleh orang-orang yang beragama Katolik dan Protestan berdasarkan "cinta kasih dan kebenaran". Kendati memperjuangkan nilai-nilai Kekristenan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, partai ini tidak bertujuan menjadikan Timor Lorosae sebagai negara agama. Tujuan akhirnya adalah masyarakat Timor Lorosae yang "bermoralitas Kristen, adil, dan sejahtera."

Sasaran perjuangannya adalah: (1) partisipasi semua orang Timor Lorosae dalam proses pembangunan; (2) jaminan kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat; (3) terciptanya keadaan yang aman, tenteram dan damai; (4) penghormatan pada sejarah perjuangan rakyat Timor Lorosae. Ketua (presiden) PDC adalah Drs. António Ximenes, sedang sekretaris jenderal adalah Pendeta Arlindo Marçal, STh.

Kepada **Julino Ximenes** dan **TI** dari

Cidadaun, Pendeta Arlindo Marçal mengatakan bahwa partai ini didirikan karena keprihatinan tentang terjadinya kehancuran fisik dan spiritual rakyat Timor Lorosae akibat kekerasan 1999. Banyak orang yang menyelamatkan diri ke Gereja, tetapi tidak selamat juga. Gereja



Sekretaris Jenderal PDC Pendeta Arlindo Marçal, STh.

yang selama ini dianggap sebagai tempat yang suci, ternyata tidak mampu memberikan perlindungan kepada umatnya. PDC didirikan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan besar ini.

PDC memperjuangkan suatu negara yang menjamin hak asasi manusia, terutama menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam hal ini, negara tidak perlu menentukan sah atau tidaknya suatu agama.

Khusus tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu (1975-1999), programnya adalah: (1) pengadilan terhadap pelaku; (2) pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Negara yang diinginkan adalah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada rakyat untuk mengelola dan menngawasi pemerintahan. Negara harus menjamin keamanan warganegara. Fungsi pertahanan dan keamanan negara dipisahkan, yakni fungsi pertahanan dijalankan oleh militer sedang keamanan oleh polisi.

Untuk kepentingan rakyat, negara mengadakan hubungan kerjasama regional dan internasional yang saling menguntungkan. Sistem pemerintahan yang diinginkan adalah semi-presidenial, sedang sistem politik multi-partai.

Bidang ekonomi, PDC memperjuangkan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menghilangkan kesenjangan ekonomi serta pemberdayaan buruh untuk peningkatan taraf hidup mereka dan produktivitas nasional. Oleh karena itu sistem ekonomi yang diinginkan adalah "sistem ekonomi berbasis kerakyatan, yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan sehat."

PDC juga memperjuangkan pemberdayaan masyarakat serta kesamaan hak dan martabat antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan untuk penduduk usia lanjut, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, dan perlindungan buruh/tenaga kerja, penyediaan informasi dan komunikasi yang merata bagi seluruh rakyat sampai desa-desa serta perlindungan lingkungan hidup. ●

Domingos Alves Kandidat Independen

Kandidat independen ini diajukan oleh organisasi seniman musik Almamor untuk memperjuangkan pengembangan kebudayaan Timor Lorosae.

• • •

Setamat SMA di Malang Domingos Alves melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya, Jakarta. Pada semester VI ia lalu pindah ke Universitas Udayana. Namun, ia meninggalkan pendidikannya sampai tingkat dokter muda karena keterlibatannya dalam dunia musik dan politik.

Sekarang di Timor Lorosae, Ikatan Dokter Timor Lorosae mengakuinya sebagai dokter. Dia berencana untuk melanjutkan studi pasca sarjana di Brazil, mengingat ia fasih berbahasa Portugis dan Inggris.

Berbekal kemampuannya, ia menanggapi kesempatan pemilu untuk Majelis Konstituante dengan antusias. Menurut kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan bangsa. Ia pun maju menjadi kandidat independen, yang dalam undian di KPI mendapatkan nomor urut 21 untuk calon wakil nasional.

Walaupun latar belakang pendidikannya ilmu kedokteran, namun ia tidak mencalonkan dirinya dari kelompok pa-

ra dokter melainkan dunia seni. Ia memang bercita-cita membangun dunia musik Timor Lorosae dengan sentuhan alam dan tradisi yang dianut oleh rakyat Timor Lorosae sejak dulu.

Karena baginya seni adalah cerminan tradisi yang dianut oleh sebuah bangsa, maka ia merasa punya tanggungjawab untuk mempertahankan tradisi budaya yang selama ini dihidupi rakyat Timor Lorosae. Penguasa Indonesia dulu sering mengatakan bahwa yang ada di Timor Lorosae hanya batu-batu, tetapi terbukti bahwa rakyat memiliki kebudayaan, memiliki seni musik, yang memberinya identitas. Inilah aset yang dilupakan, yang wajib dikembangkan sekarang ini.

"Perlu anda ketahui bahwa, pembangunan kesenian tradisional rakyat, juga dapat mengangkat perekonomian rakyat kecil karena kesenian rakyat merupakan daya tarik utama bagi pembangunan dunia pariwisata," katanya. Karena itu, ia berkeinginan agar pemerintah dan masyarakat memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengekspresikan kemampuan seninya secara

bebas tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Pencalonannya dalam pemilu mendapat dukungan dari Almamor (Asosiasi Nasional Muzika Timor Lorosae), yang lambangnya ia gunakan untuk mengikuti pemilu ini.

Tetapi ia tidak berjuang untuk kepentingan seniman saja. Ia juga bertekad untuk memperjuangkan pembangunan masyarakat yang menyeluruh untuk kepentingan seluruh rakyat Timor Lorosae.

Di bidang pendidikan, ia menginginkan suatu sistem pendidikan nasional yang terlepas dari berbagai kepentingan individu maupun kelompok. Suatu sistem pendidikan yang mengakomodir pluralisme dalam masyarakat Timor Lorosae serta memperhatikan generasi muda yang berbakat seni agar mereka bisa mengespresikan dengan bebas bakat-bakat seni yang dimilikinya.

Mengenai sistem politik, ia menyerahkan keputusan pada mekanisme demokrasi nanti. Sedang presiden, menurutnya harus dipilih oleh rakyat. Dalam bidang ekonomi, ia memandang musik sebagai salah satu pilar perekonomian rakyat, yang harus direalisasikan melalui pembangunan industri musik dengan teknologi modern dan mempertahankan serta mengembangkan kekhasan tradisi budaya rakyat agar tidak tenggelam dalam kompetisi kebudayaan internasional. Kekhasan dan keaslian budaya kita mempunyai nilai jual yang dapat mem-



Lambang Domingos Alves dalam pemilu (No. 21)

bangun perekonomian rakyat kecil.

Ia bertekad mempertahankan tradisi, karena tradisi merupakan pengaruh yang signifikan bagi pembangunan seni musik.

Mengenai penghasilan Timor Gap, ia berkeinginan agar diinvestasikan ke bidang yang lain untuk membangun sumber pendapatan dari sektor non-migas yang nantinya dapat menjadi perangsang bagi pembangunan perekonomian rakyat.

Timor merdeka nanti harus membangun kerjasama dengan negara lain, dengan memasuki organisasi kerjasama regional maupun organisasi lainnya.

Tentang pembangunan hukum, ia lebih menyerahkan hal ini kepada mekanisme teknis hukum dan mengharapkan agar masyarakat hidup sesuai dengan harkat, warkat, dan martabatnya sendiri.

●

A. Castro
Laporan Nina Marques dan
Danino da Cunha

Partido Republika Nasional Timor Leste

Partai ini didirikan oleh pemuda dari berbagai latar belakang karena kecewa terhadap para pemimpin yang mereka anggap saling bertengkar saja.

• • •

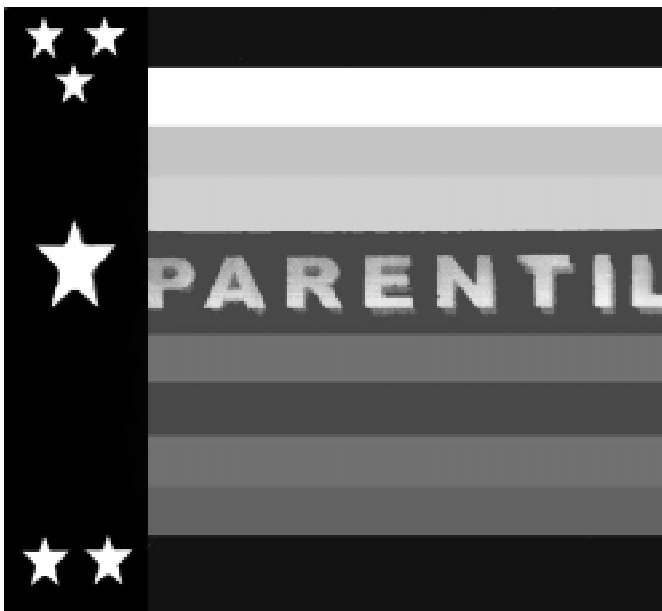
Partido Republika Nasional Timor Leste (Parentil) didirikan pada 12 Februari 2001 oleh para pemuda dengan latar belakang yang beragam. Pendiriannya didorong oleh kekecewaan terhadap perseteruan antara elit politik di Timor Lorosae. Dalam wawancaranya dengan **Nuno Hanjan** dari *Cidadaun*, Presiden Parentil Flaviano Pereira Lopes, menjelaskan bahwa Konstitusi Timor Lorosae yang akan disusun Majelis Konstituante harus memungkinkan dan menjamin adanya hubungan yang harmonis, dimana kita bisa saling mengontrol, menghormati dan menerima.

Program partai ini prioritas utamanya adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah langkah pertama untuk menangani semua sektor pembangunan bangsa.

Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 1999, Parentil mendukung digelar pengadilan internasional untuk mengadili para pelakunya. Menurut Parentil hukum internasional merupakan pilihan terakhir

jika hukum Gereja dan hukum adat tidak mampu menyelesaikannya. Jika hukum internasional tidak dijalankan di Timor Lorosae, maka mereka yang sakit hati akan terus disakiti hatinya, mereka yang miskin akan terus miskin, yang kaya terus kaya, dan yang berkuasa akan terus berkuasa. Untuk itu, Parentil telah menyebarluaskan selebaran yang isinya mendesak Dewan Keamanan PBB supaya meminta UNTAET segera menerapkan hukum internasional di Timor Lorosae.

Karena perspektif seperti itulah, Parentil menolak menandatangani Pacto Unidade Nacional. Parentil meminta da-



lam Pacto Unidade Nacional dimasukkan ketentuan bahwa hukum internasional harus diberlakukan di Timor Lorosae. Karena partai-partai lain menolak, Parentil tidak mau menandatangani.

Mengenai rekonsiliasi, Flaviano menjelaskan bahwa rekonsiliasi harus berpijak pada kebenaran dan keadilan. Tidak bisa dilakukan dengan berpijak pada pandangan subyektif suatu kelompok, juga tidak bisa dengan mengabaikan kea-

an nasional, rekonsiliasi harus terjadi antar pemimpin politik dan internal setiap partai politik. Pada tataran internasional, rekonsiliasi harus terjadi antara Timor Lorosae, Portugal, Indonesia, dan negara-negara barat yang dulu mendukung penjajahan Portugal dan penduduk Indonesia atas Timor Lorosae.

Di bidang ekonomi, Parentil memperjuangkan sistem perekonomian yang memberikan prioritas pada pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping melakukan kerjasama dengan investor asing. Para investor diberikan kesempatan untuk menanamkan modalnya di Timor Lorosae dengan ketentuan harus memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan hasilnya tidak boleh dibawa semuanya ke luar Timor Lorosae. Dengan demikian, investasi asing dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Timor Lorosae.

Pengembangan perekonomian rakyat harus terjadi dalam kondisi di mana rakyat terlibat secara aktif. Kaum intelektual dilibatkan untuk memberdayakan masyarakat di basis, yang mampu membangun kesadaran dan mentalitas rakyat agar dapat membangun dirinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan asing. Pada saat yang sama akan dikembangkan juga pelatihan-pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Sistem pelayanan publik yang bisa menjamin persamaan setiap orang untuk mendapat pelayanan yang adil dan merata. •

adilan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Parentil setuju dibentuknya Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi, asal dalam pelaksanaannya sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Rekonsiliasi sendiri harus berlaku pada tataran nasional, masyarakat basis, dan internasional. Pada tatar-

Kandidat Independen Olandina Caeiro

"Saya tetap akan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Itu sudah jelas," tegasnya. Berikut wawancaranya dengan **Octavia do Carmo** dan **TI** dari *Cidadaun*.

• • •

Olandina Caeiro adalah kandidat independen nasional no. 19. Ia, bersama Teresa Maria de Carvalho dan Maria Domingas Fernandes diutus oleh Rede Feto Timor Lorosae (yang beranggotakan 15 organisasi perempuan) untuk menjadi kandidat nasional dengan tugas memperjuangkan dimasukkannya jaminan perlindungan dan pemajuan hak perempuan dalam konstitusi Timor Lorosae merdeka.

Aktivis yang lahir 2 November 1956 di Ermera ini sejak September 1975 hingga invasi Indonesia menjadi penyiar Radio Maubere, radio pembebasan nasional yang dioperasikan Fretilin. Di zaman Indonesia, ia menjadi pegawai kantor pajak dan pernah menjadi anggota DPRD Timor Timur. Secara sembunyi-sembunyi ia terus melakukan sesuatu untuk perjuangan kemerdekaan.

Sekarang ibu seorang anak dan nenek tiga cucu ini menjadi direktur ET-Wave (East Timorese Women Against Violence dan for Children Care) yang dibentuknya bersama sejumlah aktivis di masa pendudukan Indonesia dengan

nama Gertak (Gerakan Perempuan Anti-Kekerasan).

Menurutnya, sampai sekarang ia terus memperjuangkan hak dan martabat kaum perempuan dan anak-anak, dan rakyat Timor Lorosae umumnya, yang lebih 90% keadaannya rentan (*vulnerable*). Penderitaan mereka ini diperberat oleh pembumihangusan yang membuat banyak orang kehilangan keluarga, rumah, harta-benda, dan sebagainya. Ia bertekad berjuang agar mereka ini hidup layak sebagai manusia.

Berikut ini adalah sebagian dari yang akan diperjuangkannya untuk masuk dalam Konstitusi. Konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional harus diratifikasi sebagai instrumen yang menjamin hak rakyat.

Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kekerasan masa lalu harus dilakukan dengan keadilan. Konstitusi harus mencantumkan ini.

Bidang ekonomi, ia memperjuangkan agar Konstitusi menjamin supaya perekonomian Timor Lorosae bertumpu pada kekuatan sendiri, tidak mengandalkan pada orang atau negara lain



DOKUMENTASI PRIBADI

karena akan menyebabkan ketergantungan.

Mengenai kedudukan perempuan yang masih rentan terhadap kekerasan, menurutnya perempuan harus aktif bekerja supaya mendapatkan kemerdekaan ekonomi. Dengan kemerdekaan ekonominya, ia tidak akan mudah menjadi sasaran kekerasan. Konstitusi harus menjamin agar hukum benar-benar menjamin kehidupan dan melindungi keselamatan perempuan.

Jaminan tersebut diperlukan, antara lain karena selama ini tradisi Timor Lorosae menganggap bahwa perempuan itu tempatnya adalah di dalam rumah, menikah, lalu mengurus rumah tangga, selesai. Ini harus diubah. "Saya tahu akan sulit untuk memulainya, tetapi kalau dimulai yang lain akan mengikuti. Saya percaya bahwa suatu saat orang di Timor Lorosae akan mengerti dan mene-

rima," kata Olandina.

Menghadapi masa kampanye ini, Olandina kelihatan santai saja. Menurutnya, memang ia harus berkampanye, tetapi ini bukan prioritas yang utama. "Prioritas utama saya adalah program saya harus jalan. Kampanye jalan tetapi kegiatan lain tidak boleh berhenti. Sekarang ini banyak orang yang harus bekerja untuk makan dan memperbaiki rumahnya, apakah saya harus mengumpulkan mereka hanya untuk mendengarkan saya berkampanye? Saya tidak mau mengganggu orang," katanya. Ia lebih banyak berkampanye melalui poster, radio, brosur, dan televisi.

Orang yang memilihnya, menurutnya, tidak rugi karena telah tahu perjuangannya. Kalau orang tidak memilih? "Saya tetap akan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Itu sudah jelas," tegasnya. •

Partido Social Democrata (PSD)

PSD bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat sipil (*civil society*) di Timor Lorosae, yang "diilhami nilai-nilai sosial demokrasi".

• • •

Pada 20 September 2001, sejumlah pemimpin Timor Lorosae mendirikan Partido Social Democrata (PSD), yang dinyatakan sebagai partai yang berhaluan "tengah." Menurut deklarasinya, mereka ini meliputi sayap "demokratis tengah kiri" dan sayap demokratis "tengah kanan". Agaknya yang dimaksud dengan "kiri" adalah Fretilin dan "kanan" adalah UDT. Ini terlihat pada kenyataan bahwa para pemimpin mereka berasal dari kedua partai tersebut. PSD dipimpin oleh Ir. Mário Carrascalão sebagai Presiden dan Leandro Isac sebagai Wakil Presiden.

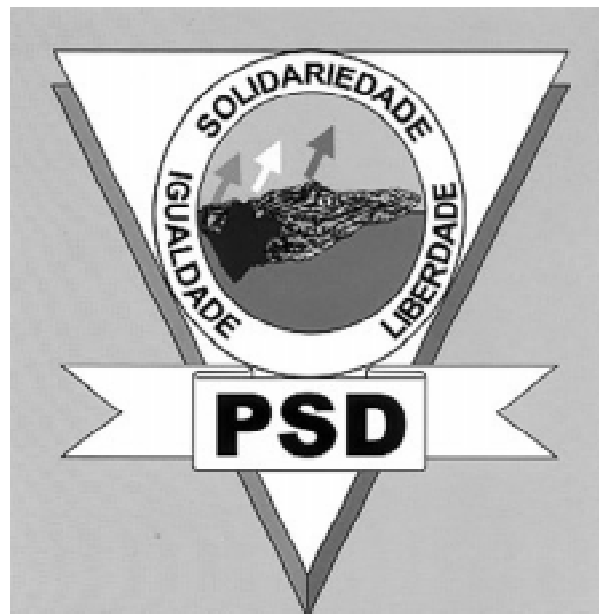
Tujuan partai ini menurut dokumen Program Partai, adalah terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) di Timor Lorosae "yang diilhami nilai-nilai sosial demokrasi, yakni kebebasan, persamaan, dan solidaritas."

Untuk itu, mereka akan menciptakan suatu "suatu sistem demokrasi kehidupan" yang tujuannya:

1. Mempercepat pengurangan jurang perbedaan sosial;

2. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan pembentukan kelas *media* (menengah) yang dominan dalam negara, tanpa harus memarginalisasikan orang-orang kaya atau melupakan orang-orang miskin. Konsep kenegaraan yang hendak diwujudkan memiliki empat unsur:

1. Negara hukum, yang menjaga kredibilitas hukum dan menjamin keadilan.
2. Negara yang berdaya guna, yang selain menjalankan fungsi-fungsi klasiknya, juga mengatur semua urusan yang penting dan strategis untuk kesejahteraan rakyat
3. Negara sosial, yaitu negara yang aktif memberikan pelayanan sosial.



4. Negara berwawasan lingkungan, yang sangat menghargai nilai-nilai kondisi alam dan lingkungan hidup.

Menurut Leandro Isac, wakil presiden partai ini kepada **Nuno Hanjan** dan **Rui Viana** dari *Cidadaun*, mereka sudah memiliki rancangan konstitusi, yang akan disampaikan pada Majelis Konstituante. Konstitusi ini berpijak pada kepentingan dan tuntutan riil bangsa yang dirumuskan secara tegas dan pasti agar tidak memberi peluang penafsiran yang sangat fleksibel sehingga mudah digunakan untuk kepentingan penguasa. PSD juga mengusulkan dibentuknya pengadilan konstitusional yang berwenang mengadili penafsiran isi konstitusi negara.

Sistem pemerintahan yang diusulkan PSD adalah sistem "semi-presidensial",

yaitu Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Presiden mengangkat Perdana Menteri dengan terlebih dahulu mendengar pendapat wakil-wakil partai dalam DPR, sedang Perdana Menteri bertanggungjawab kepada Presiden dan DPR. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat berfungsi membuat undang-undang dan keputusan politik serta mengontrol pemerintah.

PSD juga mengusulkan administrasi pemerintahan Timor Lorosae yang baru, dengan pembagian:

1. Dua Daerah Khusus (Ibu Kota Negara dan Oecussi)
2. Tiga Distrik: Distrik Barat, Distrik Tengah, dan Distrik Timur
3. Sebelas Kotamadya
4. Dewan Desa menggantikan Sub-Distrik
5. Dewan Rukun Tetangga atau Knuu menggantikan Desa.

PSD mendukung agar konstitusi mencantumkan rekonsiliasi dan pengadilan internasional untuk menyelesaikan kejahatan terhadap kemanusiaan 1999.

Mengenai investasi asing, akan diupayakan agar ada ketentuan dalam konstitusi bahwa investasi asing di Timor Lorosae harus memberikan kontribusi bagi pengembangan kapasitas lokal dan memberikan sumbangan bagi akumulasi kas negara. Tentang pendapatan dari minyak Celah Timor, PSD memperjuangkan pembentukan institusi independen yang berwenang mengelola pendapatan darinya. •

Partido KOTA (Klibur Oan Timor Asswain)

Wakil Presiden KOTA Clementino dos Reis Amaral menuturkan persepektif partainya kepada Edio Saldanha dan Julino Ximenes dari *Cidadaun*.

• • •

Tujuan utama KOTA adalah mempersatukan dan memakmurkan rakyat agar bisa keluar dari kemiskinan. Menghadapi pemilu, KOTA telah menyiapkan rancangan konstitusi yang terdiri atas 84 pasal. KOTA berharap semua lapisan masyarakat memberikan kontribusi dalam proses pembuatan konstitusi, sehingga aspirasi dan kepentingan semua golongan dapat diakomodisasi.

KOTA memperjuangkan sistem pemerintahan semi-presidensial dan "Republica de Timor" sebagai nama resmi negara Timor Lorosae. Di dalam sistem ini kepala negara dipegang oleh presiden, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang berwenang membentuk kabinet. Pemerintahan dalam negeri berasas desentralisasi, hubungan pemerintah distrik dengan pusat bersifat langsung. Misalnya, untuk urusan pertanian, kepala distrik bisa berhubungan langsung dengan menteri pertanian. Tidak perlu ada departemen atau instansi terkait di tingkat distrik seperti zaman Indonesia.

Salah satu prioritas utama kota untuk

membangun masa depan Timor Lorosae adalah pendidikan. KOTA memperjuangkan agar rakyat yang miskin memperoleh pendidikan gratis untuk semua tingkatan. Sedang golongan mampu tetap dikenai biaya.

KOTA memperjuangkan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan Tetum sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dan Inggris dipertahankan sebagai bahasa pendidikan dan perdagangan.

Untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia 1999, sebelum pengadilan didahului dengan rekonsiliasi. Ini adalah yang paling tepat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.

KOTA telah menyiapkan suatu paket program pembangunan secara menyeluruh. Prioritas utamanya peternakan, pertanian, perikanan, industri pariwisata, dan investasi. Peningkatan hasil pertanian rakyat dilakukan melalui perluasan areal dan penerapan pertanian organik. Sedang di bidang perkebunan diusahakan peningkatan produksi kopi antara 1-2 ton per tahun. KOTA akan berusaha semaksimal mungkin agar rakyat tidak kesulitan mencari pekerjaan.

F.X. SUMARYONO



• • •

Dukungan investasi asing diperlukan untuk program pembangunan tersebut. KOTA mendukung prioritas investasi pada bidang infrastruktur, perikanan, dan transportasi. Untuk infrastruktur, akan dibangun jalan tol dari Baucau ke Dili, menembus Batugede, Oe-cusse sampai ke Timor Barat.

Untuk mencegah pemborosan, pendapatan Timor Gap harus disimpan di Bank Swiss. Sedang untuk membiayai kebutuhan negara, digunakan sumber lain, seperti pajak.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, KOTA mengupayakan terbentuknya badan khusus yang berwenang melakukan analisis dampak lingkungan hidup.

Sektor pelayanan publik harus dikelola oleh negara, agar rakyat yang mis-

kin pun bisa menikmati. Pada 10 tahun pertama rakyat dibebaskan dari pajak, karena banyak yang masih miskin. Penarikan pajak dilakukan setelah kondisi membaik dan beban pajak yang dikenakan tetap tidak memberatkan rakyat.

Tentang hubungan kerjasama dengan negara lain, Pemerintah Timor Lorosae mendatang harus menjalin kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia agar dapat diterima sebagai anggota ASEAN. Kerjasama tersebut juga penting untuk mencegah agar tidak terjadi gangguan keamanan di perbatasan. Selain itu, dibangun hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, seperti Australia dan negara-negara berbahasa Portugis. Prinsip utama KOTA adalah perlunya dijalin hubungan baik dengan seluruh negara di dunia ini. •

Mengapa Pemilu?

Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

• • •

• Meskipun setiap orang diakui haknya untuk mengambil bagian dalam proses pemerintahan di negaranya tidak berarti bahwa pemerintahan dijalankan oleh setiap individu warganegara tersebut. Jadi bagaimana prinsip dalam DUHAM tersebut dilaksanakan? Dalam pemerintahan, yang merupakan institusi yang menangani urusan-urusan yang menyangkut kepentingan semua orang, harus ada mekanisme yang memungkinkan setiap orang punya kesempatan untuk mengemukakan pendapat tentang urusan-urusan tersebut. Ayat 3 DUHAM dari pasal yang sama menyatakan bahwa kehendak rakyat hendaknya merupakan dasar dari kekuasaan pemerintah, dan kehendak tersebut hendaknya dikemukakan secara periodik melalui pemilu yang wajar dengan hak umum dan sama, harus dilaksanakan melalui pemungutan suara yang rahasia, atau melalui prosedur-prosedur pemungutan suara yang serupa. Pemilu adalah sarana di mana hak individu untuk turut serta dalam urusan publik dapat dilaksanakan.

Semangat pasal 21 DUHAM adalah memastikan keterlibatan setiap individu dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kehidupan setiap individu maupun hubungan di antara mereka di dalam masyarakat. Suatu persyaratan yang mutlak bagi pemilu adalah tersedianya alternatif-alternatif pandangan tentang bagaimana keputusan-keputusan menyangkut kepentingan umum akan diambil, serta bagaimana keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan, untuk menjamin kepentingan semua individu dalam masyarakat.

Ketiadaan alternatif akan mengebiri pemilu itu sendiri. Para pemilih dihadapkan pada hanya satu pilihan. Dampak jangka panjangnya, masyarakat pemilih menjadi apatis dan terasing dari urusan-urusan publik, dan di sisi lain tidak ada

tantangan untuk memperbaiki pilihan-pilihan, karena tidak ada kompetisi.

Dalam demokrasi perwakilan, alternatif-alternatif dikemukakan oleh partai-partai politik. Tetapi apakah kehadiran banyak partai dengan sendirinya dapat menawarkan banyak alternatif bagi masyarakat pemilih? Belum tentu! Apalagi jika partai dibentuk sebagai manifestasi dari ketidaksepakatan yang tidak mendasar dalam suatu partai. Banyak partai yang bahkan tidak dapat dibedakan namanya satu dari yang lain. Pandangan-pandangan yang ditawarkan pun tidak banyak berbeda.

Kebebasan Berpendapat

Jika dalam pemilihan umum alternatif-alternatif tidak dapat disajikan secara terbuka, kompetitif dan adil di antara kelompok-kelompok atau partai-partai yang menawarkannya, alternatif-alternatif itu tidak akan bermakna. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya, jika partai yang menguasai pemerintahan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingannya sendiri. Di Indonesia masa Orde Baru, Golongan Karya (Golkar) menggunakan semua fasilitas dan posisi publik untuk melakukan manipulasi terhadap pendapat pemilih, bahkan jauh sebelum pemilihan umum berlangsung. Seluruh media digunakan untuk mengkampanyekan pandangan Golkar. Sedang informasi tentang partai-partai lain sama sekali asing dari pemilih. Bahkan Partai Komunis Indonesia dinyatakan terlarang. Ini diperparah dengan upaya manipulasi melalui berbagai cara serta teror dan intimidasi terhadap masyarakat pemilih untuk hanya menjatuhkan pilihannya kepada Golkar dalam pemungutan suara.

Karenanya, hak untuk menyatakan pendapat melalui pemilu tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan jaminan dan perlindungan bagi

pelaksanaan hak-hak lainnya. Ketersediaan informasi dan jaminan akses pada informasi merupakan faktor yang penting. Dalam *Ketentuan Perilaku bagi Partai-partai Politik dan Entitas Lain di Timor-Lorosae* dinyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani mengakui bahwa legitimasi dari Majelis Konstituante terletak pada prinsip dasar bahwa seorang pemilih berhak untuk memilih suatu partai atau calon sesudah diberitahu tentang kebijakan-kebijakan dari partai-partai atau calon-calon independen dalam masa kampanye, tanpa interferensi, rasa takut atau sogokan.

Hal ini mensyaratkan bahwa informasi tersebut harus diperoleh pemilih supaya dapat menentukan pilihannya secara bebas di antara berbagai pilihan tersebut. Di sisi lain, partai-partai atau calon-calon independen yang bersaing dalam pemilu juga harus diberi kesempatan untuk secara bebas mengemukakan pandangan mereka secara terbuka, tanpa adanya

dekat. Kesempatan mempengaruhi pemilih semakin sempit, sementara prediksi perolehan suara mungkin masih di bawah target. Keadaan ini terkadang menggoda kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Walaupun tidak persis sama, pengalaman yang paling nyata adalah proses Konsultasi Rakyat tahun 1999. Semangat rakyat Timor Lorosae sejak masa pendaftaran hingga menjelang hari pemungutan suara membuat petinggi Indonesia dan para pendukungnya di Timor Lorosae kelabakan. Intimidasi pun semakin intensif dilakukan. Salah satu ancaman yang paling poluler yang dinyatakan secara terbuka adalah pembunuhan terhadap siapa pun yang menolak otonomi. Ini dilakukan dengan asumsi bahwa pemilih dapat diidentifikasi pilihannya sesudah pemilu. Ini jelas merupakan interferensi terhadap kebebasan memiliki pendapat secara bebas, yang menurunkan kredibilitas pemilu secara keseluruhan.

Pemilu ini tidak hanya akan memilih di antara berbagai alternatif tentang bagaimana urusan-urusan publik akan ditangani, tetapi justru menentukan aturan main yang paling mendasar tentang bagaimana urusan-urusan itu akan ditangani.

rasa takut. Pasal 19 DUHAM menyatakan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan mengemukakan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi melalui media apa pun tanpa mengenal batas-batas negara.

Suatu bentuk dari penghormatan terhadap kebebasan untuk mempunyai pendapat adalah kesediaan kelompok-kelompok yang bersaing untuk tidak melakukan klaim terhadap pemilih. Ini merupakan insentif yang sangat penting bagi kelompok-kelompok yang bersaing untuk melakukan hal terbaik untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka kepada masyarakat, tetapi juga memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian kredibilitas hasil pemilu benar-benar didasarkan pada penentuan pilihan yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar berdasarkan informasi yang mereka peroleh.

Dengan tersedianya cukup informasi tentang pemilu serta alternatif-alternatif yang tersedia, akan berkurang insentif untuk menggerakkan massa untuk melakukan tindakan kekerasan yang bertujuan membelokkan hasil pemilu untuk kepentingan kelompok tertentu. Pemilih yang memperoleh cukup informasi dan bebas untuk menentukan pilihan berdasarkan informasi tersebut akan dapat menerima keunggulan pandangan-pandangan lain yang ditawarkan, dan karenanya akan lebih mudah menerima apa pun yang dihasilkan oleh pemilu.

Kerahasiaan Pemungutan Suara

Ketika kampanye politik sedang dilaksanakan, kelompok-kelompok yang bersaing dalam pemilu mulai melakukan prediksi tentang berapa jumlah suara yang dapat mereka himpun dari para pemilih. Ini merupakan tantangan tersendiri, terutama ketika hari pemilu semakin

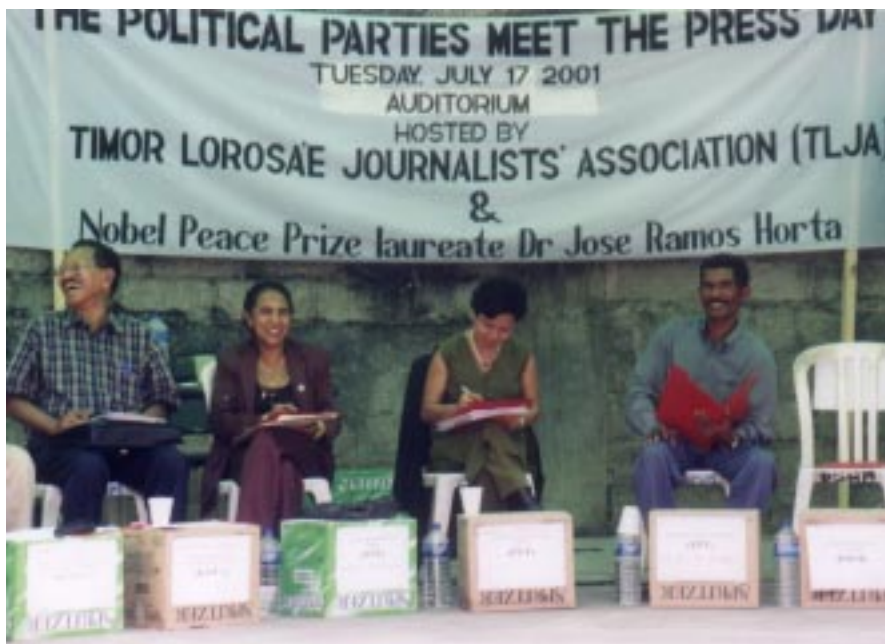
Dalam keadaan seperti ini, kebebasan mengemukakan pendapat tidak terjamin. Pasal 25 (b) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mensyaratkan, agar pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, pemilu harus dilaksanakan secara rahasia, artinya tidak seorang pun boleh mengetahui pilihan orang lain. Dengan demikian pemilih dapat menjatuhkan pilihannya kepada salah satu pilihan tanpa harus merasa takut akan adanya konsekuensi di luar konteks pemilu.

Mekanisme Pengawasan

Dalam perspektif demokrasi perwakilan, pemilu sebetulnya bukan merupakan proses titipan keputusan sepenuhnya. Meskipun wakil-wakil dari partai atau calon perorangan telah dipilih untuk mewakili kepentingan pemilih, tidak dengan sendirinya mereka menjadi pemegang monopoli segala keputusan menyangkut kepentingan masyarakat yang perlu diambil. Mereka mempunyai kewajiban untuk terus berkomunikasi dengan konstituen yang telah memilihnya, sehingga pandangan dan aspirasi masyarakat dapat mewarnai keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat tetap ikut serta dalam proses pemerintahan, dan tidak terasing dari proses pengambilan keputusan.

Pemilu Timor Lorosae 30 Agustus mendatang maknanya lebih dalam lagi. Pemilu ini tidak hanya akan memilih di antara berbagai alternatif tentang bagaimana urusan-urusan publik akan ditangani, tetapi justru menentukan aturan main yang paling mendasar tentang bagaimana urusan-urusan itu akan ditangani. Pemilu mendatang akan memilih wakil-wakil yang akan menyusun konstitusi bagi negara Timor Lorosae. •

Joaquim Fonseca, Kepala Divisi Advokasi Kebijakan Yayasan HAK.



Pertemuan partai politik dengan jurnalis: menawarkan alternatif-alternatif?